

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada Bab ini Penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1. *Auditing*

2.1.1.1. Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk lebih memahami pengertian *auditing* itu sendiri, maka berikut adalah beberapa pengertian *auditing* yang dikemukakan oleh beberapa ahli akuntansi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2010:4) definisi *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan.

Menurut Soekrisno, Agoes (2012:3) dalam “*Auditing*” (Audit Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik) pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Mulyadi (2014:9) definisi *auditing* secara umum adalah:

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Hery (2016:10) definisi *auditing* secara umum adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi-definisi auditing di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan *auditing*, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksa dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan

independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

2.1.1.2. Jenis-Jenis *Auditing*

Menurut Sukrisno Agus (2012:10) *Auditing* terdiri atas beberapa jenis sama halnya. Jenis *Auditing* dapat dibedakan atas:

1. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - b. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari jenis pemeriksaan
 - a. Audit Operasional

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
 - b. Pemeriksaan Ketaatan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

c. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

d. Audit Sistem Informasi

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:16-19) jenis auditing adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan sarana-sarana untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Karena banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar

pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Oleh karena perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus kepada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan oleh para ahli di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisien dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit laporan keuangan (*Financial Statement Audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dari laporan keuangan dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku umum.

2.1.1.3. Pengertian Auditor

Auditor dapat didefinisikan secara umum adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Adapun beberapa pengertian auditor menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (2013:2) definisi auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada audit untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008:4) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Maka dapat disimpulkan bahwa auditor adalah seseorang yang kompeten dan independen dalam memberikan jasa audit untuk memeriksa laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.4. Jenis-Jenis Auditor

Menurut Hery (2016:2) jenis-jenis auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu auditor pemerintah, auditor forensik, auditor internal dan auditor eksternal. Berikut penjelasan dari pada masing-masing jenis auditor tersebut yaitu:

1. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan Negara. Selain BPK, ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan auditor internal atau Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD. Satuan Pengawasan Intern (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Government*) di BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional.

2. Auditor Pemerintah

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan). Dalam praktik, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit terkait pengungkapan atas suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan memberikan pernyataan pendapat sebagai seseorang ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dinamakan sebagai sebagai audit investigasi, dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi.

3. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*certified public accountant*). Seseorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik sebuah kantor akuntan publik (KAP) atau sebagai anggotanya, beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.

2.1.2 Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun, ketaatan terhadap manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku” (Sukrisno Agoes 2012:204).

Auditor internal menurut Mulyadi (2010:29) adalah sebagai berikut:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian operasi.”

Auditor internal dalam perusahaan BUMN dikenal dengan sebutan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi SPI BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 perihal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

2.1.2.2 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan menurut (Hiro Tugiman, 2014:41) yang mengandung arti bahwa:

1. Keandalan informasi: pemeriksaan internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi.
2. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
3. Perlindungan terhadap harta: memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dan diamankan terhadap segala sesuatu macam kerugian atau kehilangan.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien: pemeriksaan internal yang harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.

5. Pencapaian tujuan: pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta member rekomendasi atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Ruang lingkup audit internal, auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan berjalan efektif serta efisien sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Menurut Mulyadi (2010:212), Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan
4. Mereview berbagai operasi atau program

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi *finansial* dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mulyadi (2013:164)

Alvin A. Arens (2008: 370) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, menyatakan “sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut.”

Abdul Halim Abdul (2003: 197) menyatakan bahwa “Struktur pengendalian internal adalah berbagai macam kebijakan dan prosedur yang dilakukan secara sistematis oleh entitas yang bertujuan agar keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan tetap terjaga.”

Dari definisi-definisi di atas, pengendalian internal dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan dari usaha atau tindakan entitas dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menjaga pelaporan keuangan entitas, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta menjaga ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

2.1.3.2 Komponen Pengendalian Internal

Terdapat 5 komponen Pengendalian Internal menurut Amin Widjaja tunggal (2010:196) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan fondasi dari komponen lainnya. Meliputi beberapa faktor meliputi:

- a. Integritas dan Etika
- b. Tanggung jawab dan Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
- c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment)

Terdiri dari identifikasi resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti pengembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetisi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakterister pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko meliputi kemungkinan terjadinya resiko dan bagaimana mengelola resiko.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara yaitu General Controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan system development dan Application controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization and validity dari proses transaksi.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas untuk asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

5. Pemantauan (Monitoring)

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.1.3.3 Tujuan Pengendalian Internal

Tiga (3) tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian yang efektif menurut Alvin A. Arens (2008: 370) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo, yaitu:

1) Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian memiliki peran mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien agar mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi, baik keuangan maupun non keuangan yang akurat berkaitan dengan operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan.

3) Kepatuhan pada hukum dan peraturan

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba wajib menaati berbagai hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang harus dipatuhi berkaitan langsung dan tidak langsung dengan akuntansi. Hukum dan peraturan yang tidak berkaitan langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sedangkan yang berkaitan dengan akuntansi adalah peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.3.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan yang melekat sehingga dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan perusahaan (Sukrisno Agoes, 2012: 106), yaitu:.

- 1) Kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana.
- 2) Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.
- 3) Biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesaianan intern, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biayamanfaat tersebut.

2.1.4 Ketaatan Aturan Akuntansi

2.1.4.1 Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut (Wolk and Tearney (1997: 93-95) dalam Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012) menyatakan bahwa :

“Ketaatan aturan akuntansi yaitu suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.”

2.1.4.2 Fungsi Ketaatan Aturan Akuntansi

Aturan akuntansi yang berkualitas akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dalam bidang keuangan di sebuah instansi. Aturan akuntansi memuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sebuah instansi.

PSAP 01 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2.1.4.3 Karakteristik Ketaatan Aturan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan beberapa karakteristik Ketaatan Aturan Akuntansi, yaitu:

1) Persyaratan pengungkapan

Persyaratan pengungkapan menjelaskan bahwa setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

2) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik

Melalui laporan keuangan dan kinerja suatu entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik jika dengan itu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

3) Objektif

Prinsip objektif mengharuskan pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja untuk bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi dalam laporan tersebut harus menggambarkan dengan jujur seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, bersikap adil atau tidak memihak satu pihak tertentu yang berarti informasi dalam laporan keuangan dan laporan kinerja harus diarahkan kepada kebutuhan para pemakainya dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan satu pihak tertentu, tidak berprasangka atau bias dan bebas dari konflik kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain yang berarti bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu karena adanya konflik kepentingan di mana satu pihak

memiliki kepentingan yang berlawanan atau berbeda. Dengan demikian, prinsip objektif harus dipertahankan dalam membuat laporan keuangan dan laporan kinerja agar laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal dan lebih relevan bagi penggunanya.

4) Memenuhi syarat kehati-hatian

Pembuat laporan keuangan harus memiliki tanggung jawab dengan kompetensi, ketekunan dan kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut berarti bahwa pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja harus mempunyai kewajiban untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal dan lebih relevan bagi penggunanya

5) Memenuhi konsep konsistensi penyajian

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.4.4 Ketaatan Aturan Akuntansi dalam Pembuatan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus menyajikan laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping laporan keuangan pokok, instansi pemerintah juga wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Dalam penyusunan dan pengungkapannya, laporan-laporan tersebut harus sesuai dengan SAP yang berlaku. Jika penyusunan dan pengungkapan laporan-laporan tersebut telah sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya dapat dibandingkan.

2.1.5 Kepuasan Kerja

2.1.5.1 Pengertian kepuasan kerja

Menurut Wibowo (2011:331) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.

S. P. Hasibuan(2016: 217) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah kondisi emosional pada seorang pegawai yang senang dan mencintai pekerjaannya sikap ini terlihat dari moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Hal ini dapat dinikmati dalam pekerjaan, di luar pekerjaan, dan kombinasi dari keduanya.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah sebuah sikap positif yang ditunjukkan oleh pekerja sebagai cerminan atas pekerjaan yang dilakukannya. Jika kepuasan kerja tinggi, maka pekerja akan bersikap positif terhadap pekerjaannya.

2.1.5.2 Teori Kepuasan Kerja

Wibowo (2011: 336) menjelaskan teori kepuasan kerja sebagai berikut:

1) *Two-Factor Theory*

Teori ini menyatakan bahwa *satisfication* (kepuasan) dipengaruhi oleh faktor yang terkait langsung dengan pekerjaan, seperti prestasi kerja, kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan promosi dan sifat pekerjaan, sedangkan *dissatisfication* (ketidakpuasan) dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan kerja, seperti kualitas pengawasan, penggajian, kondisi kerja, hubungan antar pekerja dan lain-lain.

2) *Value Theory*

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi ketika hasil pekerjaan yang diterima oleh individu seperti apa yang diharapkannya. Semakin besar perbedaan hasil pekerjaan yang diterima dengan harapan, semakin rendah pula kepuasan kerja seseorang.

2.1.5.3 Penyebab Kepuasan Kerja

Menurut Wibowo (2011:342) terdapat empat (4) faktor yang menyebabkan adanya kepuasan kerja, yaitu:

1. *Need fulfillment* (pemenuhan kebutuhan)

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya yaitu :

- a. Kondisi kerja
- b. Keamanan kerja
- c. Fasilitas
- d. Pengawasan (supervisi)

2. *Value attainment* (pencapaian nilai)

Gagasan *value attainment* adalah bahwa kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting yaitu :

- a. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja
- b. Gaji Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan.
- c. Faktor intrinsik dari pekerjaan atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu.

3. *Equity* (keadilan)

Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja.

4. *Discrepancies* (perbedaan)

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya diperkirakan individu akan puas apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. `

2.1.6 Kecenderungan Kecurangan

2.1.6.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemukan oleh auditor dalam suatu audit. Auditor mungkin akan menemui berbagai temuan dan bentuk yang terjadi di lapangan. Bukan hanya itu mungkin auditor juga akan melihat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan *fraud* serta siapa saja pelaku yang memungkinkan untuk melakukan *fraud*. Mengungkap terjadi atau tidaknya *fraud* merupakan salah satu tanggung jawab auditor meskipun bukan tanggung jawab secara mutlak.

Mark F. Zimbelman (2014: 7) yang dialih bahasakan oleh Novita puspitasari menyatakan arti kecurangan sebagai berikut:

“Kecurangan merupakan suatu istilah umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaiian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejahatan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia”.

Karyono (2013:4-5) menyatakan arti kecurangan sebagai berikut:

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Amin Widjaja Tunggal (2016:3) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Dari definisi diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa kecurangan (*fraud*) ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait.

2.1.6.2 Pengertian Kecenderungan Kecurangan

Kecenderungan diartikan sebagai ‘lebih tertarik pada.’ namun tidak selalu tertarik pada, yang disimpulkan karena berbagai perilaku, yang diperankan banyak mengandung nilai-nilai, yang menuju ke arah pada hal-hal. (Daryanto, 1997:32 dalam Siti Thoyibatun 2009).

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) yaitu tindakan yang mengarah pada perlakuan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012)

Kecenderungan kecurangan menurut Armand, 2007:98 dalam Siti Thoyibatun 2009 menyatakan bahwa:

“Kecenderungan kecurangan umumnya terjadi karena pengaruh lingkungan intern dan lingkungan ekstern.”

2.1.6.3 Ciri – Ciri Kecenderungan Melakukan Kecurangan

Fraud pada dasarnya tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun *fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*.

Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*) menurut Priantara (2013:44-47)

terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi:

1. *Insentif* atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*)

Tekanan dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- a. Masalah keuangan
- b. Terlibat perbuatan kejahatan atau tidak sesuai dengan norma
- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)

- a. Sistem pengendalian internal yang lemah
- b. Tata kelola organisasi buruk

3. Dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*)

Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu *fraud* tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

2.1.6.4 Jenis - jenis Kecurangan Akuntansi

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* dalam Karyono (2013: 17-24), kecurangan terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

- a) Kecurangan Laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*nonfinancial statem* menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya dan lebih buruk dari sebenarnya.
- b) Penyalahgunaan Aset (*asset misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan kas, dan kecurangan persediaan dan aset lain.
- c) Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah, dan pemerasan ekonomi. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan kelompok tertentu.
- d) Kecurangan yang berkaitan dengan komputer, dapat berupa menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukkan data palsu.

Sedangkan menurut Reksojoedo (2013: 31-33) kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan, akan tetapi secara umum dapat dibagi menjadi tiga bentuk tindakan, yaitu:

- a) Pencurian (the act) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengambil aset milik orang atau pihak lain dengan tanpa ijin atau secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- b) Penyembunyian (concealment) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan benda, surat data, informasi, atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- c) Perubahan (conversion) adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan cara mengubah suatu benda, surat, data, informasi atau fakta mengenai suatu transaksi atau mengenai aset perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Segala bentuk kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta hak orang lain atau pihak lain. Kecurangan dalam apapun bentuknya akan berpotensi merugikan pengguna laporan keuangan, Karena menyediakan informasi laporan yang tidak benar untuk membuat keputusan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Simpulan
1.	Vani Adelin dan Eka Fauzihardani (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis	X1 : Pengendalian Internal X2 : Ketaatan Aturan Akuntansi X3 : Kecenderungan Kecurangan Y : Perilaku Tidak Etis	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan variable dependen, penulis hanya mengambil dua variable independennya yaitu Pengaruh Pengendalian Internal dan Ketaatan pada Aturan Akuntansi, kecenderungan kecurangan penulis ambil sebagai variabel dependen pada penelitian penulis.	<p>1. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negative terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, maka semakin rendahnya kecenderungan kecurangan di perusahaan.</p> <p>2. Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negative terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendahnya kecenderungan kecurangan di perusahaan</p> <p>3. Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan, artinya semakin tinggi perilaku tidak etis pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan pada perusahaan tersebut.</p>

2.	Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012)	Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening.	X : Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Y: Kecenderungan an Kecurangan Akuntansi Z: Dengan Perilaku Tidak Etis	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan empat variable independen, penulis hanya mengambil dua variable independennya yaitu pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi pada penelitian penulis.	<p>1. Keefektifan Pengendalian Internal (KPI) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>2. Kesesuaian Kompensasi (KK) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>3. Ketaatan Aturan Akuntansi (KAA) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>.4. Asimetri Informasi (AI) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan</p>
----	---	--	--	---	--

				<p>statistik, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>5. Perilaku Tidak Etis (PTE) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas manajemen dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>6. Moralitas Manajemen (MM) terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.</p>
--	--	--	--	--

3.	Kadek Anggun Kusuma Dewi, Edy Sujana, dan Gede Adi Yuniarta (2017)	Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Moralitas Individu, Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (fraud) kas (studi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD)di kabupaten buleleng).	<p>X1 : Pengendalian Intern Kas</p> <p>X2 : Moralitas Individu</p> <p>X3 : Gaya Kepemimpinan</p> <p>X4 : Kepuasan Kerja</p> <p>Y : Kecenderungan Terjadinya Kecurangan</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tempat penelitian dan variabel pengendalian intern kas, moralitas individu, dan gaya kepemimpinan, dimana Penulis mengambil satu variabel independen yang akan diteliti pada perencanaan penelitian mengambil variabel kepuasan kerja pada penelitian. Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah perusahaan BUMN di Kota Bandung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pengendalian intern kas terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) kas pada SKPD Kabupaten Buleleng, 2. benar terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara moralitas individu terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) kas pada SKPD Kabupaten Buleleng. 3. terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) kas pada SKPD Kabupaten Buleleng. 4. terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) kas pada SKPD Kabupaten Buleleng. 5. terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian intern kas, moralitas individu, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>) kas pada SKPD Kabupaten Buleleng.
----	--	---	--	--	--

4.	Ananda Aprishella Parasmitha Ayu Putri (2014)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.	X1: Keefektifan Pengendalian Internal X2 : Kepuasan Kerja Y1 : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dimana Penulis mengambil dua variabel independen yaitu pengendalian internal, kepuasan kerja dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akan tetapi penulis menambahkan satu variabel independen yaitu ketaatan aturan akuntansi sehingga dapat menjadi pembeda dari peneliti sebelumnya.	Keefektifan Pengendalian Internal sangat diperlukan dalam kegiatan operasional untuk menjaga stabilitas dan kinerja organisasi di suatu instansi. Dengan adanya Pengendalian Internal setiap kegiatan yang ada di dalam suatu instansi dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengandung implikasi bahwa sebaiknya instansi lebih memperhatikan Pengendalian Internal yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk meminimalisir Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang mungkin dapat terjadi. Kepuasan Kerja adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai atas apa yang dia dapatkan atau yang dia rasakan dalam pekerjaannya di suatu instansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengandung implikasi bahwa sebaiknya instansi lebih memperhatikan bagaimana
----	---	---	---	--	--

					<p>seorang pegawai dapat merasa nyaman berada di dalam suatu instansi, baik dari segi fasilitas maupun dari aspek yang lain sehingga seorang pegawai tersebut merasakan senang dan memiliki Kepuasan Kerja yang tinggi. Semakin tinggi Kepuasan Kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai akan mengurangi tingkat Kecenderungan Kecurangan Akuntansi yang ada di suatu instansi. Kepuasan Kerja pegawai hendaknya lebih diperhatikan agar pegawai dapat memberikan kinerja secara maksimal jika kepuasan tersebut sudah dapat terpenuhi dan juga dengan Kepuasan Kerja yang dirasakan tinggi akan semakin mengurangi tindak Kecurangan Akuntansi terjadi.</p>
--	--	--	--	--	--

5.	Wilopo (2006)	Analisis Faktor _ Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi paada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	X:Faktor- faktor yang berpengaruh Y: Kecenderungan Kecuraangan Akuntansi	Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan empat variable independen, penulis hanya mengambil dua variable independennya yaitu pengendalian internal dan ketaataan aturan akuntansi pada penelitian penulis	<p>1. Pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut. Artinya semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan.</p> <p>2. Kesesuaian kompensasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN dan perusahaan terbuka di Indonesia. Artinya pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan.</p> <p>3. Ketaatan dari akuntan atau penanggung jawab penyusun laporan keuangan terhadap aturan akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Artinya semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan.</p> <p>4. Asimetri informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Artinya</p>
----	------------------	--	--	---	---

					<p>semakin tinggi asimetri informasi pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan.</p> <p>5. Moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p>6. Perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Artinya semakin rendah perilaku tidak etis dari manajemen pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi.</p>
--	--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan

Pengendalian internal dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan dari usaha atau tindakan entitas dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menjaga pelaporan keuangan entitas, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta menjaga ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Abdul Halim (2003: 197) menyatakan bahwa:

“Struktur pengendalian internal adalah berbagai macam kebijakan dan prosedur yang dilakukan secara sistematis oleh entitas yang bertujuan agar keandalan pelaporan keuangan entitas, efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan tetap terjaga. Jika pengendalian internal suatu instansi lemah, maka dimungkinkan bagi para pegawainya untuk melakukan tindak kecurangan. Oleh karena itu, segala macam kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan harus benar-benar dijalankan agar tujuan instansi dapat tercapai”.

Diperkuat oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Wilopo (2006) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan tersebut. Artinya semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan”.

“Pengendalian Internal sangat diperlukan dalam kegiatan operasional untuk menjaga stabilitas dan kinerja organisasi di suatu instansi. Dengan adanya Pengendalian Internal setiap kegiatan yang ada di dalam suatu instansi dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengandung implikasi bahwa sebaiknya instansi lebih memperhatikan pengendalian internal yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk meminimalisir kecenderungan

kecurangan akuntansi yang mungkin dapat terjadi.” Ananda prishella parasmita ayu putri (2014).

Vani adelin dan Eka fauzihardani (2013) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas pengendalian internal maka akan mampu menurunkan kecenderungan kecurangan”.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan, begitu juga sebaliknya jika pengendaliannya buruk maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangannya.

Hipotesis 1 (H1): Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan.

2.2.2 Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan

Aturan akuntansi yang berkualitas akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dalam bidang keuangan di suatu perusahaan. Aturan akuntansi memuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan perusahaan dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Wolk and Tearney (1997: 93-95) dalam Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012) menjelaskan bahwa:

“Ketaatan aturan akuntansi yaitu suatu laporan keuangan dinyatakan menaati aturan akuntansi jika menerapkan pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang tertuang dalam standar akuntansi. Standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor”.

Diperkuat oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Wilopo (2006) menyatakan bahwa:

“Ketaatan dari akuntan atau penanggung jawab penyusun laporan keuangan terhadap aturan akuntansi memberikan pengaruh yang signifikan dan negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan. Artinya semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan”.

Vani adelin dan Eka fauzihardani (2013) menyatakan bahwa:

“Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan kecurangan perusahaan”.

Nur ratri kusumastuti dan Wahyu meiranto (2012) menyatakan bahwa:

“Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan kecurangan. Alasan penolakan hipotesis ini diduga karena adanya faktor lain misalnya faktor tekanan dalam suatu organisasi perusahaan. Tekanan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan manajemen perusahaan dapat membuat manajer melakukan segala hal seperti manipulasi dan pemalsuan dokumen untuk mencapai target tersebut. Laporan keuangan akan disusun sebaik mungkin sesuai aturan akuntansi sehingga laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sesuai tujuan”.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan, begitu juga sebaliknya jika manajemen perusahaan tidak taat pada aturan akuntansi, maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangannya.

Hipotesis 2 (H2): Terdapat Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan.

2.2.3 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan

Kepuasan kerja adalah sebuah sikap positif yang ditunjukkan oleh pekerja sebagai cerminan atas pekerjaan yang dilakukannya. Jika kepuasan kerja tinggi, maka pekerja akan bersikap positif terhadap pekerjaannya.

Wibowo (2011:366) menjelaskan bahwa:

“Two-Factors Theory bahwa *satisfaction* (kepuasan) dipengaruhi oleh faktor yang terkait langsung dengan pekerjaan, seperti prestasi kerja, kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan promosi dan sifat pekerjaan, sedangkan *dissatisfaction* (ketidakpuasan) dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan kerja, seperti kualitas pengawasan, penggajian, kondisi kerja, hubungan antar pekerja dan lain-lain. Pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan bersikap positif kepada pekerjaannya, sedangkan pegawai yang memiliki ketidakpuasan dalam bekerja, maka ia akan bersikap negatif terhadap pekerjaannya. Ketika seorang pegawai tidak memiliki kepuasan kerja, ia akan melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, instansi disarankan dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai agar kecurangan instansi dapat dihilangkan”.

Diperkuat oleh penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Ananda prishella parasmitha ayu putri (2014)

“Kepuasan kerja adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai atas apa yang dia dapatkan atau yang dia rasakan dalam pekerjaannya di suatu instansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini mengandung implikasi bahwa sebaiknya instansi lebih memperhatikan bagaimana seorang pegawai dapat merasa nyaman berada di dalam suatu instansi, baik dari segi fasilitas maupun dari aspek yang lain sehingga seorang pegawai tersebut merasakan senang dan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai akan mengurangi tingkat kecenderungan kecurangan yang ada di suatu instansi”.

Kadek anggun kusuma dewi, Edy sujana dan Gede adi yuniarta (2017) menyatakan bahwa”

“Kepuasan kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) artinya semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin rendah tingkat kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini tercermin dari hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa komunikasi antara karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai sebagai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi para karyawan sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja. Kepuasan kerja tersebut tentu akan membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan dimana karyawan tidak akan berperilaku yang dapat mengecewakan perusahaan seperti melakukan suatu kecurangan. Semakin tinggi tingkat komunikasi di dalam suatu perusahaan akan menimbulkan rasa kepuasan dalam bekerja sehingga akan menyebabkan semakin rendah tingkat kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

Dalam hal ini perusahaan harus bisa memenuhi kepuasan kerja seorang karyawan, semakin tinggi tingkat kepuasan kerja seorang karyawan , maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan, begitu juga sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi kepuasan kerja seorang karyawan , maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangannya.

Hipotesis 3 (H3): Terdapat Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan.

2.2.4 Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan.

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (dalam, Abdul Halim 2003: 202) menyatakan bahwa:

“Adanya pengendalian internal memberikan jaminan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan perusahaan tersebut meliputi: pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, kepatuhan pada hukum dan aturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas aktivitas perusahaan. Instansi yang memiliki pengendalian internal efektif, maka kecurangan akan berkurang. Faktor lain yang harus diperhatikan instansi adalah ketaatan aturan akuntansi instansi. Ketika suatu instansi menaati segala standar akuntansi mengenai pengukuran dan penyajian laporan keuangan, maka semakin kecil pula kesempatan atau peluang pegawai melakukan kecurangan. Kepuasan kerja juga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh instansi. Pegawai yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan terhindar dari kecurangan. Ketidakpuasan kerja yang dimiliki pegawai dapat meningkatkan kecurangan. Jika dalam suatu instansi seorang pegawai memiliki kepuasan kerja yang tinggi, pengendalian internal instansi berjalan dengan efektif serta ditaatinya aturan akuntansi, maka kecurangan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kepuasan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kepuasan kerja secara bersama-sama dapat menekan tingkat kecenderungan kecurangan seendahnya mungkin yang ada di perusahaan.

Hipotesis 4 (H4): Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan secara bersama-sama

Landasan Teori

- Auditing : Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2011:4), Soekrisno Agoes (2012:3), Mulyadi (2014:9), Hery (2016:10)
- Kecenderungan Kecurangan : Mark F. Zimbelman (2014: 7), Karyono (2013:4-5), (Alvin A. Arens, 2008: 432), Amin Widjaja Tunggal (2016:3), Mulyadi (2013:164), Abdul Halim (2003: 197), *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* (dalam, Abdul Halim: 2003), (Sukrisno Agoes, 2012: 106), (IAI dan Daryanto, 1997:32 dalam Siti Thoyibatun 2009)
- Pengendalian Internal : Mulyadi (2013:164), Alvin A. Arens (2008: 370), Abdul Halim (2003: 197), *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* (dalam, Abdul Halim: 2003), (Sukrisno Agoes, 2012: 106)
- Ketaatan Aturan Akuntansi : (Wolk and Tearney (1997: 93-95) dalam Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012), PSAP 01 PP RI Nomor 71 Tahun 2010, PP RI Nomor 71 Tahun 2010
- Kepuasan kerja : Wibowo (2011:331-342), S. P. Hasibuan(2016: 217)



Referensi

1. Wilopo (2006)
2. Ananda prishella parasmitta ayu putri (2014)
3. Nur Ratri Kusumastuti dan Wahyu Meiranto (2012)
4. Vani adelin dan Eka fauzihardani (2013)
5. Kadek anggun kusuma dewi, Edy sujana dan Gede adi yuniarta (2017)



Data Penelitian

1. Auditor-auditor Internal pada Perusahaan BUMN yang ada di Kota bandung, PT. Pindad (persero), PT. Inti (persero), PT. Len Industri (persero)
2. Kuisisioner dari 40 responden
3. Factor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan

Premis 1

7. Abdul Halim (2003: 197)
8. Wilopo (2006)
9. Ananda prishella parasmitta ayu putri (2014)
10. Vani adelin dan Eka fauzihardani (2013)



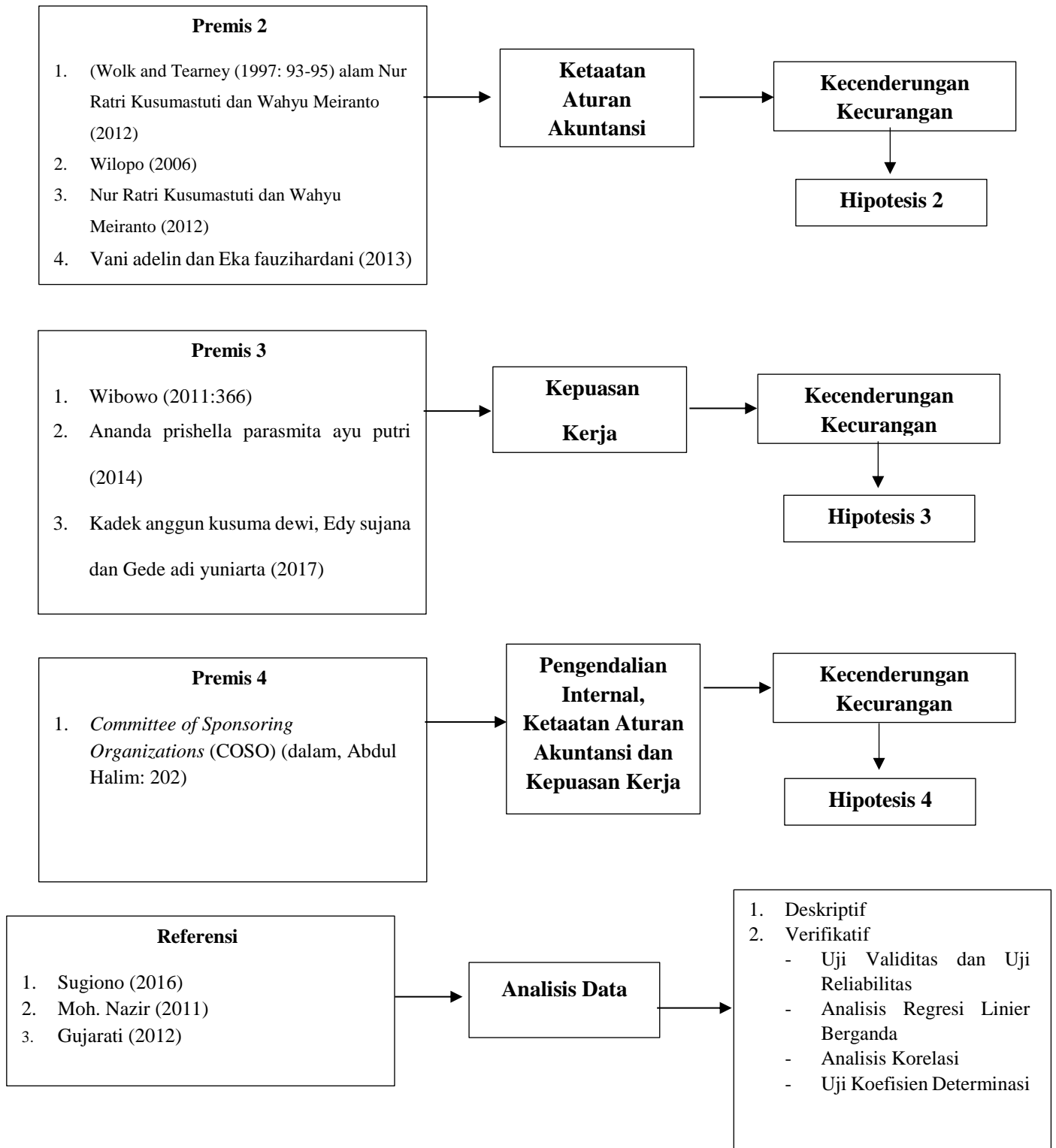
Pengendalian internal



Kecenderungan Kecurangan



Hipotesis 1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016:93).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan.

Hipotesis 2 (H2): Terdapat Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan.

Hipotesis 3 (H3): Terdapat Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan.

Hipotesis 4 (H4): Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan secara bersama-sama.